

NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME, POSTSTRUKTURALISME DAN POSTKOLONIALISME

Oleh
I Nengah Suastika
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Undiksha

ABSTRAK

Nasionalisme merupakan jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan demi bangsa dan negara. Namun pasang surut rasa kebangsaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia mengindikasikan belum mengakarnya nasionalisme pada hati sanubari setiap anak bangsa. Kondisi ini terlegitimasi dengan adanya gerakan sparatisme yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme Indonesia hanya bergema ketika ada imperialisme atau ancaman yang datang dari luar saja. Sehingga patut dipertanyakan lebih dalam, apakah nasionalisme Indonesia hanya terbentuk dalam tataran “*grand narrasi*” yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa dan kalangan elit politik saja?. Guna kepentingan politik!. Sementara pondasi dasar yang semestinya dibangun oleh akar rumput tidak memahami hakekat dan makna dasar nasionalisme Indonesia. Bahkan “terkesan” nasionalisme Indonesia belum menemukan “bentuk yang pasti”, yang dapat dijadikan pedoman oleh penyelenggara negara dan generasi penerus bangsa. Sehingga, apa yang didengung-dengungkan oleh “penguasa” tidak sejalan dengan tindakan dan tata laku yang terrefleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan itu, tampaknya perlu kita analisis kembali nasionalisme masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif postmodern.

Kata Kunci: nasionalisme, postmodernisme, poststrukturalisme.

I. PENDAHULUAN

Perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa “perubahan” merupakan suatu fenomena yang senantiasa mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya. Tidak ada satu masyarakatpun yang statis secara absolut. Setiap masyarakat akan mengalami transformasi dalam arti waktu, sehingga tidak akan ada satu masyarakatpun yang memiliki potret yang sama, kalau kita cermati dalam alokasi waktu yang berbeda, apakah itu

masyarakat modern atau masyarakat tradisional, meskipun dengan laju perubahan yang bervariasi. Kondisi ini tidak terlepas dari kemampuan manusia dalam mengembangkan metode dan strategi pengetahuan untuk mengungkap dunia dengan semua realitasnya. Diawali dari zaman klasik, abad pertengahan, zaman modern sampai pada zaman sekarang manusia secara terus menerus mengembangkan berbagai macam metode dan strategi dalam mengungkap hakekat diri dan dunianya (Huijbers, 1982).

Pergantian dan perubahan zaman itu senantiasa ditandai dengan ditemukannya metode dan strategi baru oleh manusia dalam mengkaji diri dan lingkungannya. Bahkan saat ini cara berpikir modern yang “ampuh dan mujarap-pun” sudah dianggap kering dan usang oleh pendukung postmodern, karena belum mampu mewujudkan apa yang dijanjikan pemikir modern. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lyotard (1984) dalam abad modern ilmu pengetahuan atau sains yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang valid, tidak dapat melegitimasi klaimnya itu, karena aturan main sains bersifat inheren dan ditentukan oleh konsensus diantara para ilmuwan itu sendiri. Sains melegitimasi dirinya secara kongkrit dengan bantuan beberapa narasi besar (*grend narratives*) seperti hermeneutika makna, subjek yang rasional dan dan kesejahteraan untuk manusia sebagai kepercayaan yang optimis tentang kemajuan. Narasi atau kisah-kisah besar itu tidak berdasarkan legitimasinya pada peristiwa yang terjadi pada awal mula (seperti penciptaan oleh Tuhan) melainkan pada masa depan dalam suatu ide yang harus diwujudkan. Seperti keyakinan bahwa kemajuan umat manusia seluruhnya akan tercapai melalui perkembangan teknologi ilmiah yang bersifat kapitalistik. Modus semacam ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena kebanyakan proyek yang berangkat dari narasi besar telah gagal. Oleh karena itu pengkajian terhadap realitas harus dilakukan dengan melakukan dekonstruksi, yaitu aksi pembongkaran, pemisahan, dan penghancuran konstruksi dalam suatu sistem teks, dengan tujuan untuk melakukan investigasi dan eksplorasi terhadap aspek-aspek dan hal-hal yang *terdefer* atau yang tertunda (Derrida, 1976). Bagi Derrida dekonstruksi selalu merupakan dekonstruksi atas sebuah “teks”, karena sebuah teks tidak bermakna

tunggal melainkan selalu terbuka. Tujuan dekonstruksi adalah membebaskan pluralitas makna teks dari represi yang dilakukan struktur maupun pengarang, sehingga dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran.

Dalam konteks nasionalisme Indonesia yang bergema, karena adanya imperialisme Barat, perlu dikaji kembali berdasarkan perspektif dekonstruksi dan posmodern. Mengingat kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia hanya “mengaum” ketika menghadapi ancaman yang datang dari luar. Sehingga patut dipertanyakan lebih dalam, apakah nasionalisme Indonesia hanya terbentuk dalam tataran “*grand narrasi*” yang diikrarkan oleh para pendiri bangsa dan kalangan elit politik saja?. Guna kepentingan politik! Sementara pondasi dasar yang semestinya dibangun oleh akar rumput tidak memahami hakekat dan makna dasar nasionalisme Indonesia. Sehingga berbagai bentuk penyimpangan terhadap hakekat nasionalisme terus terjadi. Sebagaimana di katakan oleh Asumadi Azra (2002) bahwa dasar kebersamaan yang telah dibangun para pendiri bangsa kini dihadapkan pada tantangan menurunnya moralitas masyarakat, mudarnya nilai-nilai nasionalisme, terabaikannya identitas nasional, meningkatnya konflik antar etnis, ras dan agama, dan semakin mengutnya isu disintegrasi bangsa. Hal ini diperkuat oleh analisis Jayanegara (2008) yang menyatakan telah terjadi degradasi kesadaran dan upaya penghapusan terhadap empat pilar aset nasional, yaitu : NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang ditandai dengan adanya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri, terjadinya konflik antar ras, suku, agama, golongan, adanya upaya memasukkan piagam Jakarta untuk mengganti pembukaan, dan adanya upaya untuk mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya terstruktur yang akan meruntuhkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Bahkan “terkesan” nasionalisme Indonesia belum menemukan “bentuk yang pasti”, yang dapat dijadikan pedoman oleh penyelenggara negara dan generasi penerus bangsa. Sehingga, apa yang didengung-dengungkan oleh “penguasa” tidak sejalan dengan tindakan dan tata laku yang teraplikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemuda yang “mengikuti tren mode ala Barat”,

tapi pola pikirnya masih “endeso”. Apakah ini merupakan bentuk “imprialisme modern” yang sengaja membangun karakter masyarakat Indonesia dengan “budaya Baratnya” (terombang-ambing)?.

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi empirik di atas, tampaknya pengkajian nasionalisme dalam perspektif postmodern, poststruktural dan postkolonial sangat urgen untuk dilakukan. Mengingat dalam konteks pandangan postmodern yang berangkat dari narasi kecil yang melegitimasikan praktek-praktek pengetahuan termasuk nasionalisme, kita akan memahami “benang merah” nasionalisme Indonesia.

II. METODE PENULISAN

Pada penulisan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data dan bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber yang bertalian dengan nasionalisme, postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme. Data mengenai konsep dasar nasionalisme dalam perspektif postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme ini kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai konsep dasar nasionalisme Indonesia dalam perspektif postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme.

III. PEMBAHASAN

1. Nasionalisme dalam Perspektif Postmodern

Nation adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan (Ernes Renan, 1990). Identitas nasional merupakan produksi kesadaran kesatuan identitas (nasional) tidak pertama-tama muncul berdasarkan kesadaran akan kesatuan latar belakang budaya, etnis, agama, atau golongan sosial, tetapi lebih merupakan “strategi” (produk) sosial, budaya dan politik untuk membangun, memproduksi dan memproduksi identitas diri (*self identity*) baru sebagai penegasan identitas yang diimposisikan kekuatan penjajah. Para [nasionalis](#) menganggap negara adalah

berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (*political legitimacy*). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme biasanya tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot, karena adanya penjajahan. Bendit Anderson, (1999) mengatakan nasionalisme muncul karena adanya imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan aspek-aspek lainnya. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu [wilayah](#) tertentu dan tak beranjak dari situ untuk mempertahankan hidupnya. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan nasionalisme diantara kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin saja terdiri dari beragam ras, agama, etnik, budaya dan daerah. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, maka nasionalisme akan mengalami pergeseran makna dan bentuk perjuangannya.

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme. Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalis pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya ketika terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana

mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar dalam membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya (John Hutchinson, 1987). Perspektif etnonasionalisme yang membuka wacana tentang asal-muasal nasionalisme berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya. Nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas.

Dari sudut pandang postmodern gerakan nasionalisme mengakar pada entitas yang melekat pada pendirian dan kedirian manusia yang memiliki keragaman identitas, pola pikir, tata laku, dan pedoman hidup yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu tak ada satu bangsa pun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya karena alasan ketidakmampuan, kurang berdaya atau lebih rendah dari bangsanya. Sebagaimana dikatakan Helius Sjamsudin (2007), bahwa pemikir posmodern dan dekonstruksi adalah belajar mengkontekstualisasi, mentoleransi relativisme dan pluralisme. Mereka menolak pikiran tentang kebenaran universal (*universal truth*) yang mencari *metanarrative* atau *grand theory*. Mereka menolak otoritas yang secara implisit atau eksplisit mendukung hak istimewa dari suatu teori atas teori yang lain. Mereka menggantikannya dengan suatu titik pandang partial dan relativistik dengan menekankan ketidakpastian dan dasar menengahi dalam pembangunan teori. Bagi postmodern, gerakan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah merupakan bentuk dominasi atas bangsa yang lainnya, karena merasa lebih mapan, lebih modern, lebih pintar, lebih terhormat dan memiliki “kekuasaan” untuk memimpin bangsa yang lemah. Asumsi dasar dari proses imperialisme adalah kemampuan bangsa penjajah, perkembangan teknologi, dan pengetahuan ilmiah yang dapat diperlakukan secara universal pada semua masyarakat yang ada di dunia, tanpa memandang keragaman budaya, adat, tradisi dan kondisi sosial-geografis masyarakat yang dijajah.

Pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan dengan juga melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme

memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (Eric Hobsbawm, 1990). Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. *Imagined Communities*, Anderson, (1999) berargumen bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Kondisi ini seolah-olah menegaskan, bahwa nasionalisme yang berkembang di Asia dan Afrika merupakan sebuah pengulangan sejarah yang telah dikonsepsi oleh bangsa Barat. Untuk itu pengkajian nasionalisme mesti dilakukan berdasarkan pada narasi kecil yang melegitimasi proses pembentukan nasionalisme secara nasional itu (Lyotard, 1984). Nasionalisme Barat bangkit dari reaksi masyarakat yang merasakan ketidaknyamanan budaya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat kapitalisme dan industrialisme. Namun, Partha Chatterjee memecahkan dilema nasionalisme antikolonialisme ini dengan memisahkan dunia materi dan dunia spirit yang membentuk institusi dan praktik sosial masyarakat pascakolonial. Dunia materi adalah “dunia luar” meliputi ekonomi, tata negara, serta sains dan teknologi. Dunia spirit, pada sisi lain, adalah sebuah “dunia dalam” yang membawa tanda esensial dari identitas budaya. Dunia Spirit tidaklah statis melainkan terus mengalami transformasi karena lewat media ini masyarakat pascakolonial dengan kreatif menghasilkan imajinasi tentang diri mereka yang berbeda dengan apa yang telah dibentuk oleh modernitas terhadap masyarakat Barat. Sebagaimana dikatakan Soekarno yang mengklaim bahwa Pancasila bukan hasil kreasi dirinya, melainkan sebuah konsep yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkubur selama 350 tahun masa penjajahan. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang “dikostruksi” para pendiri bangsa sebagai identitas nasional (Soediman Kartohadiprojo, 2010).

Tampak jelas, bahwa proses nasionalisme masyarakat Indonesia merupakan gerakan kebangsaan yang ditujukan untuk membebaskan “nusantara” dengan beraneka ragam adat, tradisi, dan budayanya dari kaum imperialis, yang kapitalis, materialis dan eksploitatif. Sejalan dengan pandangan postmodern yang

sangat menghargai pluralisme adat, tradisi, budaya sebagai bentuk penolakan atas totalitas, keseragaman, universalitas, homologi yang menjadi tututan pandangan modrn. Bentuk nasionalisme Indonesia yang kemudian di landasi dan dipayungi dengan Pancasila, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat menghargai keberagaman dalam persatuan, atau persatuan dalam keberagaman (Azumadi asra, 2002). Dengan demikian akan memungkinkan terjadinya sikap yang toleran, harmoni dan damai diantara masyarakat. Pada masyarakat multikulturalisme, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaic (Suparlan, 2002).

2. Nasionalisme dalam Perspektif Postruktural

Lahirnya aliran Postrukturalisme merupakan reaksi penyempurnaan sekaligus penentangan terhadap aliran Strukturalisme. Seperti diketahui bahwa strukturalisme dapat dipahami sebagai usaha untuk menemukan struktur umum yang terdapat dalam aktivitas manusia. Perhatian utama strukturalisme adalah struktur bahasa dan ini merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai *linguistic turn* (lingkaran bahasa) yang secara dramatis mengubah sifat ilmu-ilmu sosial dan fokus ilmuwan ilmu sosial kebanyakan bergeser dari struktur sosial ke struktur bahasa (George Ritzer, 2010). Adapun tokoh utamanya adalah Claude Levi-Strauss anthropolog Prancis, yang memperluas kajian Saussure tentang bahasa ke persoalan-persoalan anthropologis. Di samping itu juga tokoh-tokoh semiotic lainnya, seperti Ferdinand de Saussure, Roland Barthes dan Louis Althuser.

Postrukturalisme tersebut dipopulerkan Jacques Derrida pada awal abad ke-20 (1980an) di Perancis dan Amerika. Postrukturalisme merupakan sebuah aliran yang sangat berkembang dan mutakhir, terutama dalam kajian sastra dan kritik sastra. Menurut pandangan Derrida, kekurangan pendekatan Strukturalisme

(linguistik) terletak pada pengendalian anggapan-anggapan (*pre-supposition*) yang tidak pernah dipertanyakan lagi, dan menggunakan konteks sains terlalu sempit. Derrida menentang hal tersebut dengan konsepsinya mengenai desain sebagai suatu penyingkapan (*design as a closure*), yang dilakukan dengan dekonstruksi (*deconstruction*).

Postrukturalisme beranggapan bahwa bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka, melainkan terpisah sifatnya dari subyek sebagai penyampai pernyataan. Subyek di sini diartikan sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana dan hubungan-hubungan sosialnya. Oleh karena itu, Postrukturalisme meletakkan dekonstruksi sebagai elemen yang sangat penting dalam pengungkapan makna yang disembunyikan penulisnya (*hidden meaning*).

Poststrukturalisme adalah salah satu area dalam politik kontemporer yang paling menarik dan vital, sayangnya masih belum banyak dipahami dalam jagad politik. Mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai golongan poststrukturalis, menurut Mackenzie biasanya menjauhkan diri mereka dari paradigma dominan dalam teori politik. Oleh karena itu poststrukturalis adalah kritik terhadap Liberalisme, Marxisme, teori kritis, teori pilihan rasional (*rational choice*) dan berbagai macam teori feminis dan varian-variannya. Mereka mempertanyakan fondasi dari teori politik terutama arti dari “hal sosial” (*the social*) dan “hal politik” (*the political*).

Menurut paham strukturalisme, kenyataan tertinggi dari realitas adalah struktur. Struktur itu sendiri adalah saling hubungan antar-konstituen, bagian-bagian, atau unsur-unsur pembentuk keseluruhan, sebagai penyusun sifat khas, atau karakter dan koeksistensi, dalam keseluruhan bagian-bagian yang berbeda (Derrida, 1976). Bila nasionalisme dilihat secara struktural, bisa disimpulkan bahwa nasionalisme bisa ada karena adanya sistem perbedaan (*system of difference*), dan inti dari sistem perbedaan ini adalah oposisi biner (*binary opposition*). Sistem perbedaan ini adalah antara imperialisme dan nasionalisme, penjajah dengan semangat kebangsaan. Dalam oposisi biner ini terdapat hirarki yaitu perbedaan status berdasarkan struktur dan kedudukan, yang pada akhirnya

menyebabkan terjadinya kesenjangan, karena yang satu dianggap lebih superior dari pasangannya atau yang lainnya. Misalnya, jiwa dianggap lebih mulia dari badan, rasio dianggap lebih unggul dari perasaan, maskulin lebih dominan dari feminin, dan sebagainya. Tentu saja dalam konteks imperialisme, bangsa penjajah dianggap lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang dijajah, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh kaum penjajah terlegitimasi, karena kedudukannya yang superior.

Nasionalisme atau semangat kebangsaan hadir dan mengemuka untuk melakukan dekonstruksi atas proses imperialisme yang dianggap tidak berdasar dan penuh dengan arogansi. Lahirnya nasionalisme disebabkan karena terjadinya imperialisme, yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Benedict Anderson, (1999) munculnya gerakan nasional untuk memisahkan dan memerdekakan diri dari negara yang dianggap kolonial sebagai bentuk kesadaran nasional untuk membangun *nation state* yang baru. Secara analitis ada tiga aspek nasionalisme, yaitu; (1) aspek kognitif, (2) aspek *goal/value orientation*, dan (3) aspek afektif. Aspek pengetahuan akan diri dan penjajah, kondisi berharga oleh perlakuan yang semena-mena, untuk mendapatkan hidup bebas dan merdeka, dan tindakan kelompok yang menunjukkan situasi dan pengaruh akibat perlakuan penjajah (Kartodirdjo, 1999). Kondisi ini menurut Derrida merupakan makna dan kebenaran yang dicari melalui proses simbol yang diperoleh dari pengalaman mental yang dialami oleh pelaku. Untuk itu strategi pertama dekonstruksi adalah membalikkan oposisi-oposisi yang sudah ada, yaitu legitimasi penguasa atas rakyat yang dikuasai. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh dari “kekejaman” tanpa legitimasi dari rakyat yang dikuasai akan menimbulkan gerakan nasional yang menuntut terjadinya perubahan dan pembebasan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.

3. Nasionalisme dalam Perspektif Postkolonial

Kolonialisme atau penjajahan Eropa yang telah berlangsung lebih dari tiga abad diseluruh penjuru benua, telah mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan mendasar pada garis-garis kultural terjajah. Dominasi

budaya yang berlangsung secara intensif dalam waktu yang relatif lama telah menghasilkan tidak hanya hilangnya kekhasan lokal, namun lebih dari itu juga telah memupuk mental Eropa sentris, budaya Eropa menjadi sebuah budaya yang adiluhung serta dapat menjadi tolak ukur kebenaran dan justifikasi keunggulan adat istiadat. Hal itulah yang kemudian merasuki mental-mental pribumi, dan seolah menjadi manusia yang beradab kalau sudah dapat berperilaku seperti orang Eropa. Tidak hanya adat istiadat, bahkan segala konsep mental yang ada dalam benak pribumi selalu eropa sentris. Hanya sebagian kecil, orang-orang yang tetap merasa sebagai manusia-manusia *inlander* yang teguh mempertahankan kediriannya sebagai individu.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dalam penghayatan realita hidup dan kebudayaannya terbelah; lebih dari itu *allienated*. Setengah asing terhadap diri sendiri, apalagi terhadap situasi dan keadaan sekelilingnya (Mangunwijaya, 1984). Bhuvaneswari Bhaduri, seorang perempuan muda berusia sekitar 16-17 tahun, ditemukan tewas menggantung diri di sebuah apartemen di Calcutta Utara tahun 1926. Kematianya menimbulkan banyak tanda tanya. Sebagian orang menduga Bhuvaneswari memilih bunuh diri karena tak kuasa menanggung malu akibat hamil di luar nikah. Namun, dugaan itu tidak berdasar, pihak keluarga memastikan bahwa ia menggantung diri setelah selesai menstruasi. Sekitar sepuluh tahun kemudian baru diketahui teka-teki kematiannya. Bhuvaneswari diketahui sebagai seorang anggota kelompok bersenjata pejuang kemerdekaan India. Keputusan untuk bunuh diri karena ia merasa tak sanggup untuk melakukan pembunuhan politik yang dipercayakan kelompok bersenjata tersebut kepadanya. Kondisi ini menunjukkan, bagaimana ketidakmampuan subaltern dalam menyuarakan isi hatinya dengan orang yang menindasnya. Subaltern merupakan istilah bagi kelompok sosial subordinat yang menjadi korban hegemonik kekuasaan, yang dipopulerkan oleh pemikir sosial asal Italia, Antonio Gramsci. Gagasan Gramsci diperkenalkan di India oleh Ranajit Guha, Sejarawan India, yang mendirikan Kelompok Kajian Subaltern.

Makanya, tidak perlu heran meskipun kolonialisme (penaklukan) fisik itu telah usai, namun penjajahan pikiran, jiwa, dan budaya masih terus berlangsung.

Penjajahan pikiran (*colonising the mind*) termasuk senjata utama kalangan penjajah untuk membuat bangsa terjajah tunduk dalam kekuasaan. Dan, penjajahan model ini tidak mudah untuk dilawan. Artinya, kolonialisme itu, dalam kaca-mata para pengkaji postcolonial, akan diusahakan untuk tetap langgeng. Orang-orang terjajah akan senantiasa dimarginalkan, diasingkan, dibaca, serta dikendalikan oleh kaum imperialis penjajah. Serta mental mereka terus dirusak dengan stigma negatif sebagai bangsa kalah, terbelakang, miskin, dan lain sebagainya.

Dengan dekonstruksi, postkolonialisme menjadi kritik atas “kerangka pikiran” Barat yang mapan, superior, maju, beradab terhadap dunia non-Barat yang terbelakang sehingga mesti diarahkan, dicerahkan, diterjemahkan menurut standar “humanisme Barat”. Upaya pem-barat-an ini dilakukan secara lembut, dari kurikulum pendidikan di sekolah hingga narasi ekonomi-politik-globalisasi internasional oleh imperialisme. Eksploitasi intelektual dan mental “Dunia Ketiga” diarahkan dengan sistematis oleh “Dunia Pertama”. Pemikir seperti Ferdinand de Saussure meletakkan konsep “oposisi biner” untuk mendekonstruksi wacana yang terstruktur dalam politik, kekuasaan dan kesadaran pengetahuan. Oposisi itu akhirnya berubah menjadi kebenaran yang di mitoskan. Ide oposisi menjadi tambahan pisau analisa bagi teori postcolonial, yang akan membongkar bangunan wacana, pengetahuan dan bahasa yang sangat bias hirarki kekuasaan.

Dalam soal pengetahuan misalnya, mengaju pemikiran Michel Foucault dalam manuskrip terkenalnya *The Archaeology of Knowledge*, Foucault telah membuka tabir superstruktur sistem dominasi atas diskursus, dan relasi kuasa dengan pengetahuan. Dengan pandangan Foucault ini teori postcolonial akan menunjukkan bagaimana Barat yang mendominasi pengetahuan orang-orang Timur dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengontrol buku teks, majalah, surat kabar, televisi, dan media lainnya. Media Barat mencuci otak negara bekas jajahan. Bagaimana MTV dan *pop culture* lainnya dengan mudahnya masuk dan melakukan penetrasi ke dalam relung-relung kesadaran anak muda di negara Dunia Ketiga. Pembongkaran bagaimana bekerjanya imperialisme Barat (Eropa

dan Amerika) terhadap dunia Islam, Timur Tengah dan “Timur” hingga kini misalnya, oleh Edward Said menjadi bukti akan hal ini. Karya besarnya “Orientalism” (1978), menunjukkan bagaimana ia men-dekonstruksi perilaku kultural dan epistemologis Barat yang ingin terus menguasai “Timur”. Menurut Said, “Timur” yang primitif dipakai sebagai cermin untuk membesarkan citra Eropa sebagai pelopor peradaban. Selain itu, mitos dan stereotipe tentang Timur dimanfaatkan sebagai sarana pembenaran Eropa untuk melakukan kolonialisasi: menguasai, menjinakkan, dan mengontrol keberadaan *the others*.

IV. KESIMPULAN

Nasionalisme adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Perjuangan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari aneka bentuk ikatan dan dominasi kekuasaan sosial dan politik lama, seperti suku bangsa, raja feodal, dinasti, untuk kemudian menyerahkan kekuasaan tertingginya pada negara kebangsaan. Dari sudut pandang postmodern gerakan nasionalisme mengakar pada entitas yang melekat pada pendirian dan kedirian manusia yang memiliki keragaman identitas, pola pikir, tata laku, dan pedoman hidup yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu tak ada satu bangsapun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya karena alasan ketidakmampuan, kurang berdaya atau lebih rendah dari bangsanya.

Nasionalisme dilihat secara struktural, bisa ada karena adanya sistem perbedaan (*system of difference*), dan inti dari sistem perbedaan ini adalah oposisi biner (*binary opposition*). Sistem perbedaan ini adalah antara imperialisme dan nasionalisme, penjajah dengan semangat kebangsaan. Dalam oposisi biner ini terdapat hirarki yaitu perbedaan status berdasarkan struktur dan kedudukan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan, karena yang satu dianggap lebih superior dari pasangannya atau yang lainnya. Tentu saja dalam konteks imperialisme, bangsa penjajah dianggap lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang dijajah, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh kaum penjajah terlegitimasi, karena kedudukannya yang superior. Menurut pandangan

poststukturalis nasionalisme hadir dan mengemuka untuk melakukan dekonstruksi atas proses hirarki yang dianggap tidak memberikan perlakuan dan hak yang sama pada setiap manusia, yang semestinya memiliki potensi dan hak yang sama.

Secara fisik penjajahan atau imperialisme telah berakhir, namun imperialisme terhadap pikiran, jiwa, dan budaya masih kental mewarnai masyarakat dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dominasi budaya yang berlangsung secara intensif dalam waktu yang relatif lama telah menghasilkan tidak hanya hilangnya kekhasan lokal, namun lebih dari itu juga telah memupuk mental Eropa sentris, budaya Eropa menjadi sebuah budaya yang adiluhung serta dapat menjadi tolak ukur kebenaran dan justifikasi keunggulan adat istiadat. Hal itulah yang kemudian merasuki mental-mental pribumi, dan seolah menjadi manusia yang beradab kalau sudah dapat berperilaku seperti orang Eropa. Tidak hanya adat istiadat, bahkan segala konsep mental yang ada dalam benak pribumi selalu Eropa sentris. Hanya sebagian kecil, orang-orang yang tetap merasa sebagai manusia-manusia *inlander* yang teguh mempertahankan kediriannya sebagai individu dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung : Satya Historika
- Anderson, B. (1999). *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Omi Intan Naomi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Inisist.
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*. Baltimore and London: John Hopkins University Prees
- Ernes. R. (1990). *What is A Nation? Dalam Nation dan Narration*: Diedit oleh Partodirdjo, Sarsono (1999). *Multidimenis Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Kanisius.
-

Kartohadiprojo, S. (2010). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka.

Kohn, H. (1965). *Nationalism Its Meaning and History*. Malabar Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.

Lyotard., J. F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report of Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rosenau, P. M. (1992). *Post-Modernism and The Social Science; Insights, Inroads dan Intrusions*. Princeton: Princeton University Press